

Judul : Pengerahan TNI Jangan Memperkeruh Konflik
Tanggal : Senin, 02 Maret 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Pengerahan TNI Jangan Memperkeruh Konflik

Komisi I DPR mengingatkan, pengerahan prajurit TNI ke Gaza harus dipastikan bertujuan untuk menjaga perdamaian, bukan menambah eskalasi konflik di Timur Tengah.

JAKARTA, KOMPAS — Keputusan pemerintah untuk mengerahkan 8.000 prajurit TNI ke Gaza harus melalui pertimbangan serius serta dilandasi mandat internasional yang sah. Keputusan itu harus berorientasi pada misi perdamaian dan kemanusiaan serta menjamin keselamatan prajurit. Jangan sampai, pengiriman prajurit TNI itu justru memperkeruh konflik di Timur Tengah yang kini semakin panas.

Pemerintah tengah menyiapkan pengiriman 8.000 prajurit TNI ke Gaza sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Pengiriman pasukan itu merupakan salah satu tindak lanjut dari keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss.

Namun, di tengah persiapan itu, terjadi eskalasi konflik di Timur Tengah. Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran hingga membuat pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei gugur. Iran pun membalas dengan meluncurkan serangan menggunakan rudal dan pesawat nirawak, termasuk ke Israel dan pangkalan militer AS di Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Arab Saudi, dan Bahrain.

Menanggapi situasi itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksmono mengingatkan, setiap rencana pengiriman prajurit TNI ke luar negeri, terlebih ke wilayah konflik seperti Gaza, harus melalui pertimbangan matang. Menurut dia, keputusan itu tidak hanya menyangkut aspek pertahanan dan keamanan nasional, tetapi juga berkaitan erat dengan politik luar negeri Indonesia yang berdasarkan prinsip bebas aktif serta komitmen terhadap perdamaian dunia.

Situasi di Timur Tengah, lanjutnya, sangat dinamis dan penuh risiko. Karena itu, Komisi I menekankan setiap langkah pemerintah harus berada dalam kerangka misi perdamaian yang sah, misalnya melalui mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau kerja sama multilateral yang diakui secara internasional.

"Kehadiran prajurit TNI harus dipastikan benar-benar bertujuan menjaga perdamaian, bukan menambah eskalasi konflik," ucap Dave saat dihubungi, Minggu (1/3/2026).

Dave juga menegaskan, keselamatan prajurit menjadi prioritas utama. Komisi I, kata

dia, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI, untuk memastikan setiap pengusutan dilaksanakan dengan persiapan optimal serta perlindungan maksimal bagi pasukan.

Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menambahkan, pebibatan TNI ke Gaza harus berorientasi pada misi kemanusiaan dan stabilisasi, bukan operasi tempur. Pengiriman pasukan tersebut juga semestinya memiliki landasan hukum yang jelas serta mandat internasional yang sah, idealnya dalam koordinasi dengan PBB.

"Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan perlindungan warga sipil di Gaza. Itu adalah amanat konstitusi dan bagian dari politik luar negeri bebas aktif kita," ujarnya.

Namun, jika Dewan Perdamaian diposisikan sebagai insiatif kemanusiaan dan rekonstruksi untuk membantu warga Gaza, menurut dia, yang perlu dipastikan adalah jaminan keamanan serta kesempatan para pihak. Mandat Dewan Perdamaian juga harus ditegaskan sebagai misi perdamaian atau perlindungan sipil agar Indonesia tidak ditempatkan dalam posisi yang eskalatif secara geopolitik.

Ia menambahkan, Indonesia memiliki reputasi baik dalam misi perdamaian dunia. Meski demikian, prioritas utama saat ini tetap penghentian kekerasan, pembukaan akses bantuan kemanusiaan, dan perlindungan warga sipil.

"Jadi, bukan soal paling pantas, tetapi soal kesiapan, legitimasi internasional, dan kebermanfaatannya nyata bagi rakyat Palestina," katanya.

Tunda pengiriman

Secara terpisah, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengingatkan pemerintah untuk menengahkan rencana pengiriman pasukan ke Gaza sembari mengkaji ulang perkembangan situasi di Timur Tengah. Pemerintah juga harus menyampaikan hal itu kepada Presiden AS Donald Trump secara tertulis. Dengan begitu, Indonesia bisa menunjukkan sikap sebagai negara yang berprinsip dan berpendirian.

Indonesia, kata Dino, harus menghindari risiko pasukan yang dikirim ke Gaza terjebak dalam komplikasi yang bisa muncul dari konflik AS-Israel dan Iran. Apalagi, konflik ter-

sebut ditengarai masih akan terus berlangsung.

"Kita tidak ingin misi perdamaian Indonesia menyimpang dari mandat ISF meskipun tidak disengaja. Pikirkan dengan matang-matang dan suk sama," tegasnya.

Seruan keluar dari BoP

Setelah AS-Israel menyerang Iran, lebih dari 65 tokoh dan 79 organisasi masyarakat sipil mendesak Indonesia keluar dari BoP. Melalui petisi berjudul "Melawan Imperialisme Baru", mereka menyalakan serangan AS-Israel terhadap Iran telah melanggar hukum internasional, khususnya Piagam PBB serta menasak perdamaian dunia.

Mereka menyatakan, "Board of Peace" telah berubah menjadi "Board of War" karena lembaga yang diketuai Trump itu justru melakukan serangan militer ke Iran. Ketua BoP yang seharusnya menjaga perdamaian sebagai mana diamanatkan dalam piagamnya dinilai bertindak sebaliknya.

"Dalam konteks itu, sudah semestinya dan seharusnya Indonesia segera menarik diri dari BoP," demikian bunyi petisi tersebut.

Secara terpisah, Guru Besar Bidang Geopolitik Timur Tengah Universitas Gadjah Mada Siti Mutiah Setyawati mengatakan, meski Indonesia telah menandatangani kesepakatan BoP, tetap terbuka opsi untuk keluar apabila dinilai merugikan kepentingan nasional. Pemerintah harus pula melindungi prajurit, jangan sampai mereka justru dijadikan umpan di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah.

Sementara itu, sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, Indonesia telah menyampaikan batasan keterlibatan pasukan atau *national caveat* kepada struktur komando ISF. Batasan itu secara tegas akan mengatur ruang gerak pasukan Indonesia yang direncanakan akan ditempatkan di Rafah, kota di selatan Jalur Gaza.

"*National caveat* kita juga sudah kita sampaikan ke ISF bahwa kita tidak melakukan operasi militer, kita tidak melakukan peluncuran senjata, kita tidak melakukan apa yang disebut demilitarisasi. Yang kita lakukan adalah menjaga masyarakat sipil di kedua belah pihak dan terlibat dalam upaya-upaya kemanusiaan yang ada di sana," tuturnya, pekan lalu. (BOW/NLA)